

PERUBAHAN

RENJA

RENCANA KERJA

2019

Inspektorat
Daerah Istimewa Yogyakarta



KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan mengacu Perubahan RKPD Tahun 2019 dan berpedoman pada Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022, maka disusunlah Perubahan Renja SKPD Tahun 2019 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat DIY Tahun 2019.

Yogyakarta, Juli 2019

Inspektur
Daerah Istimewa Yogyakarta



Wiyos Santoso, SE, M.Acc.
NIP. 19680215 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-2
1.4 Sistematika Penulisan	1-3
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2018	2-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat DIY Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	2-1
2.2 Capaian Kinerja	
2-1	
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan	2-12
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	2-14
BAB 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	3-1
3.1 Tujuan dan Sasaran	3-1
3.2 Program dan Kegiatan	3-2
BAB 4 PENUTUP	4-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Pencapaian Hasil Kinerja Tahun 2018	2-2
Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2018 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-3
Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	3-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah.....2-15

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian *tujuan (comon goals)* dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 dan berpedoman pada Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat DIY Tahun 2019 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan RKPD, Inspektorat DIY menyusun Perubahan Renja SKPD Tahun 2019 dengan maksud melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas dan pedoman pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2019 serta menyesuaikan dengan kebijakan anggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul dimasyarakat dan melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Tahun 2018

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab 4 Penutup

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DIY TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan mempunyai tugas tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Fungsi pembinaan dan pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintah masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Untuk mewujudkan *good governance* telah dituangkan dalam perubahan Renstra dan penjabaran perencanaan tahun melalui Perubahan Renja Inspektorat. Sasaran strategis Inspektorat dalam Renstra 2017-2022 adalah meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dan indikator kinerja yang ditetapkan adalah persentase tingkat temuan hasil pemeriksaan BPK dan meningkatnya TLHP BPK.

2.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai atas pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam periode waktu tertentu.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pelaksanaan kinerja Inspektorat tahun 2018 ditetapkan satu sasaran strategis, satu indikator kinerja, 5 (lima) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan.

Pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja sampai akhir tahun 2018 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir tahun 2018 realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp14.456.093.419,00 atau 95,29% dari alokasi anggaran Rp15.169.897.224,00. Anggaran tersebut terdiri belanja tidak langsung sebesar Rp5.316.937.224,00 dan belanja langsung sebesar Rp9.858.960.567,00.

Pencapaian hasil realisasi kinerja Tahun 2018 sesuai indikator kinerja kegiatan dan target pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2-1. Pencapaian Hasil Kinerja Tahun 2018

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%
01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya penggandaan dokumen dokumen - Tersedianya barang cetakan - Terbayarkannya Pajak/STNK kendaraan - Terbayarkannya Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 - Penyediaan Jasa kebersihan gedung kantor - Penyediaan retribusi sampah kantor - Tersedianya Paket pengiriman - Terbayarkannya tagihan internet up to 2 MBps - Terbayarkannya Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m³ - Tersedianya Pengisian tabung pemadam kebakaran - Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Tersedianya Pengiriman surat khusus peranko - Tersedianya Pembelian Meterai 	54.450 lembar 7 jenis 15 unit 5 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 buah 3 jenis 300 surat 360 lembar	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
		- Tersedianya Komponen instalasi listrik dan - Tersedianya Alat tulis kantor - Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif 12 bulan	5 jenis 19 jenis 12 bulan	100% 100% 100%
01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	- Kinerja 9 orang keamanan kantor sesuai dengan SPK - Kinerja 9 orang pengelola keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja 1 orang penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja 1 orang pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja 2 orang Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	100% 100% 100% 100% 100% 100%
01.035.	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	- Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik - Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun 1 tahun	100% 100%
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%
02.107	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	D E D gedung Kantor	Tersedia DED gedung tempat bekerja sesuai dengan kebutuhan	100%
02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	- Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD - Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	3 jenis 9 unit	100% 100%
02.112	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD - Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD	15 unit 5 unit	100% 100%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%
05.001.	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	- Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat - Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek	5 Orang 2 angkatan 55 orang	100% 100%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	100%
06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMP, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP A	Nilai LKjIP A
06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	- Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 2% pada 5 program 19 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 2%	100%
06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan	- Dokumen Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan SKPD - Dokumen Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 dokumen 4 dokumen	100% 100%
06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	- Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 19 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan 100%	100%
06.021	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA 2 periode @ 50 orang dalam 1 tahun	2 periode @ 50 orang	100%
038.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100 %	100%
038.001.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	- Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler - Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD - Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY - Laporan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY - Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah DIY	190 LHP 41 laporan 41 laporan 41 laporan 1 laporan 41 laporan	100% 100% 100% 100% 100% 100%
038.003.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	- Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu - Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2017 - Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah - Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi - Paket Perjanjian Kerjasama APIP dan APH	4 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 Paket	100% 100% 100% 100% 100%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
038.007.	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	- Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2019	1 SK Gubernur	100%
038.009.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota	5 Kab / Kota	100%
038.010.	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	- Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP	4 Kali	100%
038.011.	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	- Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS - Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	5500 PNS Gol IV dan Gol III 95 %	100% 100%
038.014.	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	- Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	26 LHP	100%

Persandingan indikator kinerja dan target kinerja kegiatan murni dan perubahan sesuai RKPD Perubahan tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2-2 Persandingan Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Murni dan Perubahan Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	APBD MURNI TAHUN		USUL PERUBAHAN	
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif - Alat tulis kantor - Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor - Pembelian Meterai - Peralatam kebersihan dan bahan pembersih - Pengisian tabung pemadam kebakaran - Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3 - Tagihan internet up to 2 MBps - Paket pengiriman - Retribusi sampah kantor - Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2 - Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4 - Barang cetakan - Penggandaan dokumen dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 12 bulan 13 jenis 6 jenis 320 lembar 5 jenis 3 buah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 unit 13 unit 9 jenis 71.360 lembar 	<ul style="list-style-type: none"> - Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif - Alat tulis kantor - Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor - Pembelian Meterai - Peralatam kebersihan dan bahan pembersih - Pengisian tabung pemadam kebakaran - Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3 - Tagihan internet up to 2 MBps - Paket pengiriman - Retribusi sampah kantor - Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2 - Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4 - Barang cetakan - Penggandaan dokumen dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 12 bulan 13 jenis 6 jenis 320 lembar 5 jenis 3 buah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 unit 13 unit 9 jenis 71.360 lembar

No.	Program/Kegiatan	APBD MURNI TAHUN		USUL PERUBAHAN	
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif
2.	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK - Kinerja pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK 	<ul style="list-style-type: none"> 9 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 10 orang 7 orang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK - Kinerja pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK 	<ul style="list-style-type: none"> 9 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 10 orang 7 orang
3.	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi Dan Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> - Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan - Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> 1 tahun, 44 kali 1 tahun: <ul style="list-style-type: none"> - Eselon II, 10 kali - Eselon III dan PJFT Gol IV keatas, 8 kali - Eselon IV & PJFT Gol IV a/IVb, 7 kali 	<ul style="list-style-type: none"> - Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan - Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> 1 tahun, 44 kali 1 tahun: <ul style="list-style-type: none"> - Eselon II, 10 kali - Eselon III dan PJFT Gol IV keatas, 9 kali - Eselon IV & PJFT Gol IV a/IVb, 7 kali
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
4.	Pembangunan Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Tersedianya gedung tempat kerja seluas 3.675 m2	Terselesaikannya gedung tempat bekerja tahap I 100%	Tersedianya gedung tempat kerja seluas 3.675 m2	Terselesaikannya gedung tempat bekerja tahap I 100%
5.	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	<ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD - Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 	<ul style="list-style-type: none"> 1 jenis 8 jenis 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD - Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 	<ul style="list-style-type: none"> 1 jenis 8 jenis
6.	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD - Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD 	<ul style="list-style-type: none"> 5 unit 13 unit 	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD - Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD 	<ul style="list-style-type: none"> 4 unit 13 unit

No.	Program/Kegiatan	APBD MURNI TAHUN		USUL PERUBAHAN	
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
7.	Pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	2 periode @ 70 orang	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	2 periode @ 70 orang
8.	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat - Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek 	2 orang 4 angkatan 70 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat - Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek 	2 orang 4 angkatan 70 orang
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			
9.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	Nilai LKjIP A	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	Nilai LKjIP A
10.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 18 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 2%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 18 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 2%
11.	Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Forum Perencanaan OPD 1 kali - ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 	kesesuaian perencanaan tahunan dengan Dokumen perencanaan SKPD TA 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Forum Perencanaan OPD 1 kali - ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 	kesesuaian perencanaan tahunan dengan Dokumen perencanaan SKPD TA 2020
12.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 18 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 18 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pemerintahan Pelaksanaan Kebijakan KDH				
13.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler - Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah DIY - Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi - Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY - Pengelolaan Dana Keistimewaan - Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - Laporan Cash Opname dan Stock Opname SKPD 	190 LHP 37 LHE 1 Laporan 37 Laporan 1 Laporan 37 Laporan 37 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler - Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah DIY - Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi - Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY - Pengelolaan Dana Keistimewaan - Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - Laporan Cash Opname dan Stock Opname SKPD 	190 LHP 37 LHE 1 Laporan 37 Laporan 1 Laporan 37 Laporan 37 Laporan

No.	Program/Kegiatan	APBD MURNI TAHUN		USUL PERUBAHAN	
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif
14.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	5 Laporan EKPPD	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	5 Laporan EKPPD
15.	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	- Rekapitulasi hasil pengawasan - rekapitulasi hasil tindak lanjut pengawasan	1 laporan 3 laporan	- Rekapitulasi hasil pengawasan - rekapitulasi hasil tindak lanjut pengawasan	1 laporan 3 laporan
16.	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%
17.	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	50 LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	65 LHP
18.	Pengawasan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	- Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi - Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah - Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) - Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu - Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa - Survey Kepuasan Masyarakat - Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2019	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 1 Laporan 1 SK Gubernur	- Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi - Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah - Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) - Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu - Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa - Survey Kepuasan Masyarakat - Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2019	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 1 Laporan 1 SK Gubernur

Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel2-2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s.d. Triwulan II Tahun 2019 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TahunLalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1	Urusan Pemerintahan											
1	01	Bidang Urusan Pemerintahan										
1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	49,62%	50,38%	
1	01	01	01	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif 12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	47,16%	52,84%
				Alat tulis kantor 19 jenis								
				Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor 12 jenis								
				Pembelian Meterai								
				Pengiriman surat khusus perangko								
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih								

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pengisian tabung pemadam kebakaran								
					Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3								
					Langganan 4 jenis surat kabar harian								
					Tagihan internet up to 2 MBps								
					Paket pengiriman								
					Retribusi sampah kantor								
					Jasa kebersihan gedung kantor								
					Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2								
					Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4								
					Barang cetakan								
					Penggandaan dokumen								
					Fumigasi arsip								
					Pembelian buku								
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	46,73%	53,27%
					Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku								
					Kinerja 9 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK								
1	01	01	03	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi Dan Konsultasi	Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55,33%	44,67%
					Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun								

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20,27%	79,73%
1	01	02	107	Pembangunan Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	D E D gedung Kantor	-	-	100%	100%	100%	100%	20,02%	79,98%
1	01	02	108	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan kantor sesuai RKBMD 1 jenis	100%	100%	-	-	-	-	-	-
					Peralatan kantor sesuai RKBMD 3 jenis								
					Meubeleir sesuai RKBMD 2 jenis								
1	01	02	109	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Perawatan garasi kendaraan dinas 150 m2,	100%	100%	-	-	-	-	-	-
1	01	02	111	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	AC Split sesuai RKBMD 30 unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	46,24%	53,76%
					Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD 13 jenis								
1	01	02	113	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD 5 unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45,70%	54,30%
					Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD 15 unit								
1	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	49,79%	50,21%
1	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat 10	100%	100%	-	-	-	-	-	-
1	01	05	003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui bimtek : 55 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	49,55%	50,45%
1	01	05	007	Pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,80%	49,20%
1	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70,73%	29,27%

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	06	016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMP, Renstra dan IKU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	06	017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 6 program 22 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78,02%	21,98%
1	01	06	018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD Serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70,83%	29,17%
					Dokumen draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022								
1	01	06	019	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	42,13%	57,13%
1	01	38		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44,05%	55,95%
1	01	38	001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	100%	100%	100%	100%	100%	100%	42,44%	57,56%
					Laporan Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2016								
					Laporan Evaluasi LAKIP 2016								
					Laporan Hasil Pendampingan								
					Laporan Review Laporan Keuangan SKPD DIY								
					Laporan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY								
					Laporan Review RKA SKPD DIY								
					Laporan Monev SPIP SKPD								

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
					Laporan Pendampingan Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY SKPD									
					Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD									
					Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD									
					Consulting dan Quality Assurance Pengawasan SKPD									
1	01	38	003	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	51,26%	48,74%	
					Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah									
					Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2016									
					Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu									
1	01	38	007	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
1	01	38	009	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43,82%	56,18%	
1	01	38	010	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	18,02%	81,98%	
1	01	38	011	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	49,98%	50,02%	
					Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS 5000 PNS									

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	38	014	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	51,26%	48,74%

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah latimewa Yogyakarta terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Inspektorat sampai dengan bulan Desember 2018 telah melakukan pemeriksaan reguler sebanyak 190 obyek pemeriksaan, melakukan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2018 terhadap 41 SKPD di lingkungan Pemerintah DIY. Hasil dari pemeriksaan tahun 2018 terdapat 754 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti sejumlah 689 (91,37%).

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat DIY tahun 2018 telah melakukan :

- a. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.
- b. Pemeriksaan khusus dan pengembangan temuan.
- c. Melakukan Evaluasi LKJiP.
- d. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- e. Review Atas Laporan Keuangan SKPD dan Pemda DIY.
- f. Evaluasi AKIP Kabupaten/ Kota
- g. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

Sedangkan bentuk dan hasil pengawasan lainnya meliputi :

- a. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD.
- b. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Pencermatan RKA SKPD.
- d. *Consulting* dan *Quality Assurance*.
- e. Melakukan Kas Opname dan Stok Opname.
- f. Pendampingan pengelolaan dana keistimewaan SKPD.

Pada tahun 2018 Inspektorat DIY juga melaksanakan kegiatan- kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- b. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.
- c. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.
- d. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- e. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan : Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala SKPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
- f. Melakukan penilaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) kepada PNS Daerah Istimewa Yogyakarta Golongan III/a ke atas untuk dilaporkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Menteri Dalam Negeri.
- g. Membantu kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

- h. Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012.
- i. Melakukan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) berkerjasama dengan Irwasda POLDA DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, Ombudsman DIY dan Badan Intelijen Negara Daerah DIY.

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Sesuai Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menentukan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 16 (3) disebutkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan program strategi nasional di daerah;
- d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- e. pengawasam dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

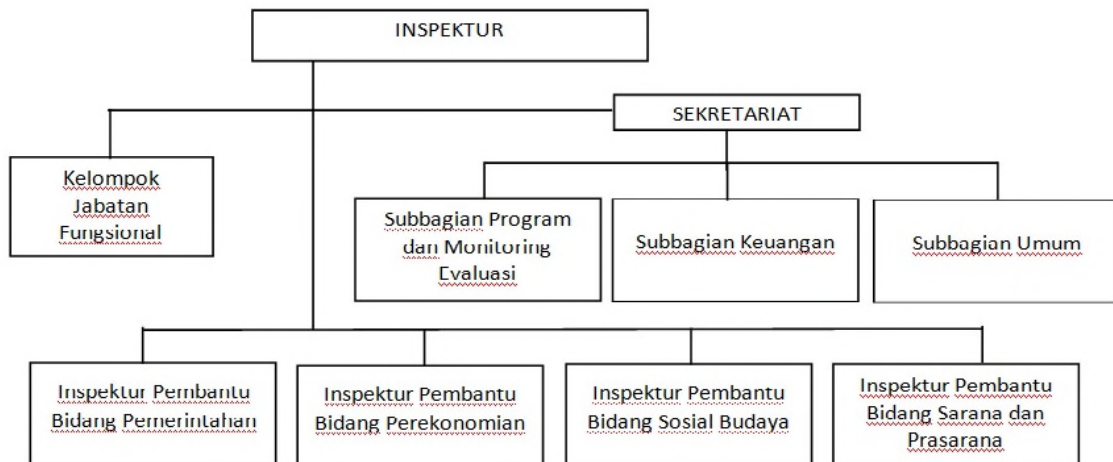
Dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menetapkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Adapun berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

dan Tata Kerja Inspektorat pada Bagian Kedua Pasal 3 ayat (1), Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Umum
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
- d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian
- e. Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya
- f. Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar2.1 Susunan Organisasi Inspektorat DIY



2.4.1. Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2018 Bab III Bagian Kesatu pasal 4 bahwa Inspektorat DIY mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat DIY mempunyai fungsi sebagaimana disebutkan pada pasal 5 sebagai berikut:

- a. perencanaan program kerja Inspektorat;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
- g. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

2.4.2. Keadaan Pegawai

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pegawai sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang per 1 Februari 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan		Jumlah
1	Struktural	a. Inspektur (Eselon II.A)	1
		b. Sekretaris (Eselon III.A)	1
		c. Inspektur Pembantu (Eselon III.A)	4
		d. Kepala Sub Bagian (Eselon IV.A)	3
2	Fungsional tertentu	Auditor	38
		P2UPD	15
3	Fungsional Umum	Staf	17
	Jumlah		79

2.4.3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai pendukung Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

a. Gedung	: 1 unit
b. Kendaraan roda 4	: 13 unit
c. Kendaraan roda 2	: 4 buah
d. Komputer yang dapat digunakan	: 50 buah
e. Laptop yang dapat digunakan	: 22 buah
f. Notebook	: 6 buah
g. AC yang dapat digunakan	: 40 buah

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat DIY terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Gedung yang ada terdiri dari 2 unit, 1 unit gedung induk dan 1 unit gedung arsip/perpustakaan. Saat ini gedung induk sudah dilakukan perobohan/pemusnahan dan proses pembangunan Gedung Inspektorat DIY direncanakan mulai bulan April 2019 serta masa pembangunan selama 2 tahun. Selama pembangunan Gedung Inspektorat DIY tersebut, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat DIY menempati gedung di Kompleks Youth Centre Jl. Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta yang merupakan gedung milik Balai Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY mulai bulan Desember 2018.
2. Kendaraan Dinas/Operasional untuk pengawasan belum mencukupi jumlahnya karena dari jumlah 13 unit yang ada, 1 unit untuk keperluan pimpinan 2 untuk kebutuhan kesekretariatan, selain itu terdapat 2 unit mobil yang dalam kondisi sering mengalami kerusakan yang digunakan untuk mendukung pemeriksaan. Sedangkan 10 unit digunakan untuk operasional pengawasan sedangkan Tim yang ada sejumlah 16 Tim, kondisi ini merupakan hambatan aktivitas pemeriksaan. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan penambahan 3 unit kendaraan Dinas/Operasional roda 4.
3. Jumlah komputer yang dapat digunakan sebanyak 51 unit, 38 unit berumur lebih dari 8 tahun dan sering terjadi kerusakan yang sering mengganggu kinerja. Untuk itu diperlukan peremajaan unit-unit komputer secara bertahap.
4. Jumlah Lap Top yang dapat digunakan 24 buah semuanya berumur lebih dari 8 tahun juga sering terjadi kerusakan yang juga mengganggu kinerja khususnya pada saat ketugasan di luar kantor. Peremajaan laptop perlu dilakukan pula secara bertahap untuk menunjang kinerja

5. Jumlah AC 44 unit, 20 unit diantaranya sudah berumur lebih dari 10 tahun juga sering terjadi kerusakan. Hal ini cukup mengganggu kenyamanan dalam bekerja.
6. Peralatan untuk pendukung pemeriksaan sangat minim/tidak memadai antara lain LCD proyektor dari 4 unit yang berfungsi dengan baik 2 unit, scanner 7 unit scanner, dengan jenis portable 2 unit yang hanya bisa untuk scan dalam bentuk lembaran kertas dan 5 unit jenis stamp namun demikian kurang maksimal untuk mendukung pemeriksaan terutama saat dilapangan, serta alat ukur kurang memadai.

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, Inspektorat DIY melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap Obyek Pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal.

Sebagaimana visi Pembangunan DIY “ ***Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja***” .

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui **dua misi pembangunan daerah** sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban**
- 2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.**

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan mendukung Visi Misi Kepala Daerah dari sisi *Quality Assurance*, yang berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai VISI Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Terkait dengan Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, tujuannya adalah terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi

sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian ditetapkan sarannya adalah meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal.

Sedangkan sasaran program 01 s.d 06 adalah ***Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran OPD.***

3.2. Program dan Kegiatan

a. Program.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Adapun program-program yang diusulkan Inspektorat DIY pada tahun anggaran 2019 ada 5 (lima) sebagai berikut :

- 1) Program Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH.

b. Kegiatan.

Kegiatan dilakukan untuk merealisasikan program dan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2019 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta merencanakan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.583.793.354,00. Belanja Langsung 5 (lima) Program 18 (delapan belas) kegiatan dengan rencana anggaran Rp28.323.572.000,00. Sehingga Total Anggaran sebesar Rp33.907.365.354,00.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;
2. Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran;
3. Penyediaan Rapat-rapat dan Koordinasi;
4. Pembangunan Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;

5. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan;
6. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional;
7. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu;
8. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD;
9. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
10. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi;
11. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD;
12. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
13. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
14. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
15. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
17. Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan;
18. Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan tahun 2019 dan Sumber Dana

No	Program	Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan	Sumber Dana
			Murni	Perubahan			
1.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	436,593,000	436,593,000	-		APBD
		1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	627,531,651	629,481,651	1,950,000	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan Jasa Keamanan Kantor yang belum dianggarkan	APBD
		1.3. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	500,582,000	500,582,000	-		APBD
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	18,284,071,000	18,383,071,000	99,000,000	untuk pekerjaan jasa konsultasi design interior dan penilaian kembali RAB Gedung Inspektorat DIY	APBD
		2.2. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	37,600,000	37,600,000	-		APBD
		2.3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	139,739,000	139,739,000	-		APBD

No	Program	Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan	Sumber Dana
			Murni	Perubahan			
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	3.1. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	23,960,000	23,960,000	-		APBD
		3.2. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	101,700,000	101,700,000	-		APBD
4.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	4.1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1,162,000	1,162,000	-		APBD
		4.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1,638,000	1,638,000	-		APBD
		4.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	81,250,000	80,650,000	(600,000)	efisiensi DPA	APBD
		4.4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	2,813,000	2,813,000	-		APBD
5.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	5.1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	5,914,152,000	5,914,148,000	(4,000)	efisiensi DPA	DID
		5.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	216,385,000	216,385,000	-		DID
		5.3. Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	92,265,000	91,215,000	(1,050,000)	efisiensi DPA	DID
		5.4. Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	27,230,000	27,230,000	-		DID
		5.5. Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah	378,425,000	491,743,000	113,318,000	Tambahan pemeriksaan khusus sebanyak 15 titik	DID
		5.6. Pengawasan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	1,437,525,000	1,368,380,000	(69,145,000)	efisiensi DPA	DID
Jumlah			28,304,621,651	28,448,090,651	143,469,000		

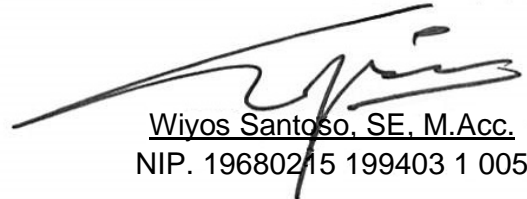
BAB 4 PENUTUP

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kelembagaan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2019 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat perubahan pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5.583.793.354,00 menjadi sebesar Rp5.736.941.642,00; dan Belanja Langsung yang terdiri 5 (lima) Program 18 (delapan belas) kegiatan dengan anggaran Rp28.304.621.651,00 menjadi sebesar Rp28.448.090.651,00. Sehingga Total Anggaran menjadi sebesar Rp34.185.032.293,00.

Yogyakarta, 2019

Inspektur

Daerah Istimewa Yogyakarta



Wiyos Santoso, SE, M.Acc.
NIP. 19680215 199403 1 005